

Pendapat Masyarakat tentang Efektivitas Penanganan Parkir Liar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Nesya Ratri Pramudita^{1*}, Hurian Kamela²

¹⁻²Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Universitas Terbuka, Indonesia

E-mail: 048090522@ecampus.ut.ac.id¹, hurian.kamela@ecampus.ut.ac.id²

*Penulis korespondensi: 048090522@ecampus.ut.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the influence of the effectiveness of illegal parking management, policy effectiveness, and public opinion on the Original Local Revenue (PAD) of Medan City. The issue of illegal parking that has not been optimally addressed has the potential to cause parking fee leakage and hinder regional revenue growth. This study uses a quantitative approach with a survey method. Data were collected through the distribution of questionnaires to 71 respondents and analyzed using validity tests, reliability tests, multiple linear regression analysis, t-tests, and determination coefficients. The results of the study show that the effectiveness of illegal parking management has a positive and significant effect on Medan City's Original Local Revenue. Policy effectiveness also proves to have a positive and significant effect on PAD. Meanwhile, public opinion does not have a significant effect on Original Local Revenue partially. Simultaneously, all independent variables affect Regional Original Revenue. This finding indicates that the increase in local revenue from the parking sector is more influenced by the effectiveness of policies and the implementation of illegal parking management than by public perception. Therefore, local governments need to strengthen supervision and policy consistency in parking management to optimize regional revenue.*

Keywords: *Illegal Parking; Local Own Source Revenue; Medan City; Public Perception; Policy Effectiveness.*

Abstrak. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas pengelolaan parkir ilegal, efektivitas kebijakan, dan opini publik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Parkir ilegal yang belum tertangani secara optimal berpotensi menimbulkan kebocoran retribusi parkir dan menghambat pertumbuhan pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data kuisioner 71 responden dengan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan parkir ilegal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Medan. Efektivitas kebijakan juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sementara itu, opini publik tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD secara parsial. Secara bersamaan, semua variabel independen mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan lokal dari sektor parkir lebih dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan parkir ilegal daripada persepsi publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan konsistensi kebijakan dalam pengelolaan parkir untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Kata kunci: Parkir ilegal, efektivitas kebijakan, pendapatan asli daerah, Kota Medan, persepsi publik

Kata kunci: Efektivitas Kebijakan; Kota Medan; Parkir Ilegal; Pendapatan Asli Daerah; Persepsi Publik.

1. LATAR BELAKANG

Permasalahan parkir liar menjadi salah satu isu yang masih menjadi hambatan utama dalam tata kelola transportasi perkotaan di Indonesia. Keberadaan parkir liar berdampak pada kebocoran penerimaan daerah yang seharusnya masuk ke kas pemerintah melalui retribusi resmi. Menurut Oktaviani et al. (2024), lemahnya pengawasan dan tidak optimalnya sistem pengelolaan parkir menjadi penyebab utama rendahnya efektivitas penerimaan retribusi parkir di tingkat daerah. Penelitian Zahaldi et al. (2024) menunjukkan bahwa parkir liar dapat menurunkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 30 persen akibat tidak tercatatnya transaksi di sektor informal. Selain itu, Humaira (2024) menegaskan pengendalian parkir liar

yang tidak terstruktur dapat menimbulkan ketimpangan fiskal dan menurunkan kepercayaan publik terhadap otoritas daerah.

Kota Medan sebagai pusat perekonomian menghadapi tantangan signifikan dalam menghadapi penataan dan pengawasan parkir. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan ruang parkir yang kemudian mendorong munculnya praktik parkir liar di berbagai titik strategis kota. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Medan Tahun 2021-2026, pengelolaan parkir menjadi salah satu prioritas program strategis untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan pendapatan daerah. Menurut Fajri (2024) menemukan bahwa kebijakan pengendalian parkir liar karena lemahnya koordinasi dan minimnya sanksi hukum. Sari & Rahmawati (2023) menjelaskan efektivitas pengelolaan parkir sangat dipengaruhi oleh pemerintah, juru parkir, dan pengguna jasa.

Upaya digitalisasi parkir melalui penerapan sistem *electronic parking* (e-parking) mulai diterapkan di berbagai daerah sebagai solusi transparansi dan efisiensi pengelolaan retribusi. Implementasi e-parking diyakini dapat mengurangi kebocoran dan meningkatkan akuntabilitas penerimaan PAD daerah. Penelitian Alzena (2024) menyebutkan bahwa penerapan e-parking di Semarang berhasil menurunkan praktik pungutan liar hingga 40 persen karena pembayaran secara digital. Temuan serupa dikemukakan oleh Rahmawati & Fadillah (2023), yang menyatakan bahwa penerapan e-parking memberikan kemudahan akses bagi masyarakat serta meningkatkan efektivitas administrasi penerimaan daerah. Hidayat et al. (2022) menjelaskan keberhasilan digital bergantung khususnya kesiapan infrastruktur dan tingkat literasi digital petugas lapangan.

Selain faktor pengawasan dan teknologi, efektivitas pengelolaan parkir juga sangat ditentukan oleh aspek regulasi dan kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan publik yang dirancang tanpa melibatkan pemangku kepentingan sering kali gagal mencapai tujuan implementatif di lapangan. Menurut Rahma (2022), kebijakan penertiban parkir liar akan berjalan optimal jika diikuti dengan pembinaan terhadap juru parkir informal agar mereka tidak kehilangan sumber penghasilan. Hasibuan & Lubis (2023) bahwa keberhasilan regulasi transportasi di daerah perkotaan sangat tergantung pada koordinasi antarsektor dan konsistensi penerapan sanksi administratif. Sementara itu, penelitian Nugraha et al. (2021) menunjukkan bahwa penyusunan perda tentang retribusi parkir signifikan terhadap peningkatan PAD di kota.

Pendapat masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan parkir. Persepsi masyarakat terhadap keadilan tarif, transparansi pengelolaan, dan penggunaan hasil retribusi untuk kepentingan publik memengaruhi tingkat kepatuhan membayar. Menurut Santoso dan Kurniawan (2024),

rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir disebabkan oleh anggapan bahwa pungutan tersebut tidak memberikan manfaat langsung bagi pengguna jalan. Penelitian Pratiwi et al. (2023) menambahkan bahwa ketika masyarakat mengetahui bahwa hasil parkir digunakan untuk perbaikan fasilitas jalan, tingkat kepatuhan meningkat secara signifikan. Selain itu, studi oleh Handayani (2021) menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pengawasan lapangan berperan penting dalam mengurangi praktik parkir liar dan pungutan ilegal.

Meningkatnya kebutuhan ruang parkir di wilayah perkotaan seperti Medan menuntut pemerintah daerah untuk mencari solusi yang berorientasi pada efisiensi dan akuntabilitas. Inovasi seperti sistem parkir digital, pemetaan zona parkir berbasis GIS (Geographic Information System), dan integrasi dengan aplikasi pembayaran digital dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan transparansi transaksi. Menurut Rinaldi dan Wibowo (2022), pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen transportasi terbukti mampu menekan potensi kebocoran pendapatan hingga 25 persen. Hasil penelitian Yusuf et al. (2024) juga menegaskan bahwa penerapan parkir elektronik tidak hanya memperbaiki sistem fiskal, tetapi juga meningkatkan kepuasan pengguna jasa parkir. Temuan serupa dijelaskan oleh Pertiwi (2023), bahwa e-parking efektif dalam menekan praktik parkir liar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintah.

Penanganan parkir liar berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak juru parkir liar yang bergantung pada aktivitas ini sebagai sumber mata pencaharian sehari-hari, sehingga kebijakan penertiban yang tidak disertai dengan alternatif pekerjaan baru sering kali menimbulkan resistensi sosial. Menurut Putra dan Anwar (2022), kebijakan publik yang tidak dapat mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat akan rentan menimbulkan konflik horizontal antara aparat dan pelaku parkir liar. Penelitian Lubis dan Sembiring (2023) juga menunjukkan bahwa integrasi pendekatan sosial melalui pembinaan dan pemberdayaan juru parkir liar dapat mengurangi tingkat pelanggaran secara signifikan. Sedangkan Wulandari (2021) menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam setiap proses perumusan kebijakan penertiban agar masyarakat merasa dilibatkan secara langsung dalam upaya penataan kota.

Selain peran pemerintah daerah, dukungan teknologi informasi dan kemitraan swasta turut berperan penting dalam memperkuat sistem pengelolaan parkir. Kemitraan ini dapat meningkatkan efisiensi pelayanan serta mempercepat adopsi sistem digital di lapangan. Menurut Halim dan Saputra (2023), penerapan sistem parkir berbasis aplikasi berhasil membuat efisiensi hingga 35 persen. Wibisono et al. (2024) menjelaskan model *public-private*

partnership (PPP) pada pengelolaan parkir di Surabaya berhasil menurunkan biaya operasional dan meningkatkan akuntabilitas. Studi oleh Suryani dan Malik (2022) menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi sektor publik sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat pengguna layanan.

Keberhasilan penanganan parkir liar juga sangat ditentukan oleh efektivitas kebijakan dan komitmen politik pemerintah daerah. Ketidadaan pengawasan berkelanjutan, lemahnya regulasi, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan transportasi perkotaan. Menurut Hadi dan Prasetyo (2023), reformasi birokrasi dan peningkatan integritas aparatur merupakan elemen penting tata kelola parkir secara transparan. Sementara itu, Ramadhani et al. (2024) menekankan bahwa efektivitas kebijakan publik dalam sektor transportasi berkaitan dengan evaluasi dan pengawasan secara konsisten. Ningsih dan Mahendra (2021) menyebutkan bahwa keberhasilan kebijakan parkir ditingkat daerah dapat ditentukan oleh adanya koordinasi lintas sektor dan pengawasan berbasis masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, efektivitas penanganan parkir liar di Kota Medan merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek kebijakan, sosial, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Hal ini untuk analisis pendapat masyarakat terhadap kebijakan penanganan parkir liar yang diterapkan pemerintah kota serta sejauh mana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana dinyatakan oleh Lestari (2024), analisis persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah daerah menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan publik. Selain itu, Sihombing dan Rahayu (2023) menyatakan bahwa efektivitas dapat terjadi jika diketahui tujuan dan manfaat kebijakan tersebut.

2. KAJIAN TEORI

Efektivitas Kebijakan Publik

Efektivitas kebijakan publik yaitu kebijakan mencapai tujuan secara optimal, efisien, dan tepat sasaran. Efektivitas diukur melalui tingkat keberhasilan pelaksanaan, penerimaan masyarakat, serta dampaknya terhadap permasalahan yang ingin diselesaikan. Menurut Siregar & Munandar (2023), efektivitas kebijakan publik dapat tercapai apabila terdapat konsistensi antara perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi hasilnya. Rahman & Abdullah (2022) yaitu efektivitas kebijakan publik ditentukan oleh kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, dan dukungan masyarakat terhadap implementasi kebijakan tersebut. Sementara itu,

Syamsudin et al. (2021) menegaskan bahwa kebijakan publik akan efektif jika didukung oleh sistem pengawasan dan koordinasi antarinstansi yang kuat.

Dalam kerangka pengelolaan sektor publik, efektivitas juga berhubungan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Menurut Kartika & Fadillah (2024), efektivitas kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari prinsip akuntabilitas, karena akuntabilitas memastikan kebijakan dijalankan sesuai prosedur dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sementara itu, penelitian oleh Hidayati & Salim (2023) menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaksanaan kebijakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan publik dan memperkuat efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Di sisi lain, Wicaksono dan Lestari (2021) berpendapat bahwa efektivitas kebijakan juga ditentukan oleh kemampuan adaptasi pemerintah terhadap perubahan sosial dan teknologi, terutama dalam menghadapi dinamika perkotaan modern seperti pengelolaan parkir dan transportasi.

Efektivitas kebijakan publik dalam transportasi perkotaan dapat diukur melalui keberhasilan pemerintah daerah dalam menata sistem parkir, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lalu lintas. Penelitian Setiawan & Pratiwi (2023) menemukan bahwa efektivitas kebijakan transportasi sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antarinstansi, kejelasan regulasi, dan ketersediaan infrastruktur pendukung. Harahap & Widodo (2024) menjelaskan efektivitas kebijakan transportasi di kota besar akan meningkat apabila dilengkapi dengan sistem informasi yang terintegrasi dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan. Selain itu, Suhendra & Wahyuni (2022) menambahkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat efektivitas implementasi kebijakan publik di sektor transportasi.

Konsep Parkir Dan Parkir Liar

Parkir merupakan hal umum, sistem transportasi karena berhubungan langsung dengan mobilitas masyarakat dan ruang publik. Secara konseptual, parkir didefinisikan sebagai kegiatan menempatkan kendaraan untuk sementara waktu di suatu lokasi tertentu yang disediakan oleh otoritas atau pihak berwenang. Menurut Oktaviani et al. (2024), sistem parkir yang baik tidak hanya bertujuan menyediakan ruang bagi kendaraan, tetapi juga harus mampu mengatur arus lalu lintas dan mendukung efisiensi ruang kota. Hal ini didukung oleh penelitian Fajri (2024) pengelolaan parkir sebagai kebijakan transportasi daerah untuk pendapatan asli daerah. Sementara itu, Zahaldi et al. (2024) menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan parkir berkorelasi langsung dengan kualitas publik dan kepuasan terhadap kinerja.

Parkir liar, di sisi lain, merupakan kegiatan parkir yang dilakukan di luar area resmi yang ditetapkan pemerintah dan sering kali dilakukan tanpa izin. Keberadaan parkir liar tidak hanya menyebabkan kemacetan namun mengakibatkan kebocoran penerimaan daerah. Menurut Humaira (2024), praktik parkir liar umumnya muncul karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan retribusi. Rahayu dan Yusuf (2022) keberadaan parkir liar meningkat akibat tidak seimbangnya antara jumlah kendaraan dan ketersediaan lahan parkir resmi. Selain itu, penelitian Alzena (2024) menemukan bahwa parkir liar juga tumbuh karena lemahnya sistem penegakan hukum dan masih adanya toleransi dari aparat terhadap praktik ilegal tersebut.

Parkir liar mempunyai dampak ekonomi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika sebagian besar transaksi parkir dilakukan di luar sistem resmi, potensi pendapatan daerah menjadi berkurang drastis. Berdasarkan penelitian Sari & Rahmawati (2023), kebocoran retribusi parkir dapat mencapai 25–40% dari total potensi PAD apabila praktik parkir liar tidak ditertibkan. Hal senada dikemukakan oleh Rahmawati & Fadillah (2023) yang menyebutkan bahwa pengendalian parkir liar dapat meningkatkan akuntabilitas penerimaan daerah. Pertiwi (2023) menegaskan bahwa penertiban parkir liar melalui penerapan sistem e-parking dapat menekan potensi kehilangan pendapatan serta meningkatkan efisiensi pengawasan di lapangan.

Selain aspek ekonomi, parkir liar juga berdampak pada tatanan sosial masyarakat dan estetika kota. Menurut Handayani (2021), parkir liar menimbulkan ketidaknyamanan dan menciptakan kesan asal-asalan terhadap tata ruang kota, terutama di pusat-pusat keramaian. Penelitian Rinaldi & Wibowo (2022) menjelaskan bahwa dampak sosial parkir liar dapat mengurangi kualitas lingkungan dan menghambat mobilitas publik. Sedangkan Yusuf et al. (2024) menambahkan bahwa penertiban parkir liar tidak hanya bertujuan meningkatkan PAD, tetapi juga merupakan upaya menciptakan kota yang tertib, aman, dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan ketertiban dan citra publik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai hal utama dalam pembiayaan pembangunan dari potensi ekonomi lokal. PAD membahas kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan tanpa bergantung dari pemerintah pusat. Suryani & Prasetyo (2023), PAD berfungsi sebagai indikator kemandirian fiskal suatu daerah dan menjadi ukuran efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian Fajri & Siregar (2024) juga menegaskan bahwa peningkatan PAD dapat tercapai melalui optimalisasi sumber-sumber retribusi dan pajak

daerah, termasuk sektor parkir. Sementara itu, Oktaviani et al. (2024) menyatakan pengelolaan parkir untuk kontribusi positif terhadap peningkatan PAD dan efisiensi fiskal daerah.

Komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari keempat komponen tersebut, retribusi parkir memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan penelitian Rahayu & Yusuf (2022), kontribusi retribusi parkir terhadap PAD cenderung meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan dan aktivitas ekonomi perkotaan. Hal serupa dikemukakan oleh Sihombing & Rahayu (2023), yang menemukan bahwa peningkatan PAD di kota besar dapat dicapai apabila pengelolaan parkir dilakukan secara transparan dan berbasis digital. Selain itu, Lestari (2024) menambahkan bahwa efektivitas retribusi daerah sangat ditentukan oleh kualitas aparatur dan sistem pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Kebocoran PAD akibat praktik parkir liar masih menjadi persoalan serius dalam keuangan daerah. Banyak transaksi parkir yang tidak tercatat secara resmi, sehingga mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan dalam jumlah besar. Menurut Zahaldi et al. (2024), praktik parkir liar dapat mengurangi potensi PAD hingga 30% karena tidak adanya mekanisme pencatatan yang transparan. Sementara penelitian Pertiwi (2023) menyebutkan bahwa penerapan sistem e-parking terbukti mampu menekan kebocoran penerimaan daerah melalui pencatatan digital yang terintegrasi. Hasil penelitian Rahmawati & Fadillah (2023) juga menunjukkan bahwa pengawasan berbasis teknologi meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengumpulan PAD, terutama di sektor parkir dan transportasi.

Konteks kebijakan fiskal daerah, peningkatan PAD tidak hanya dipandang dari sisi penerimaan, tetapi juga sebagai wujud kemandirian dan akuntabilitas pemerintah daerah. Menurut Kartika & Fadillah (2024), daerah dengan sistem pengelolaan PAD yang akuntabel cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap kinerja pemerintah. Harahap & Widodo (2024) bahwa tata kelola PAD yang transparan dapat memperkuat stabilitas fiskal daerah serta memperbaiki kualitas layanan publik. Di sisi lain, penelitian Pratiwi et al. (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pendapatan daerah dapat meningkatkan kepatuhan wajib retribusi dan memperkuat keberlanjutan fiskal.

Persepsi dan Partisipasi Masyarakat

Persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik sangat menentukan keberhasilan implementasi program pemerintah di tingkat daerah. Persepsi yang positif akan meningkatkan dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang diberlakukan. Menurut Santoso &

Kurniawan (2024), persepsi masyarakat terbentuk melalui pengalaman langsung dan tingkat kepercayaan terhadap institusi publik. Jika masyarakat menilai kebijakan tidak adil atau tidak transparan, maka resistensi terhadap kebijakan tersebut cenderung meningkat. Penelitian Wulandari (2021) juga menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tujuan kebijakan berperan penting dalam menumbuhkan sikap kooperatif terhadap implementasi di lapangan. Lestari (2024) menegaskan bahwa persepsi publik merupakan indikator awal keberhasilan efektivitas kebijakan daerah karena mencerminkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Partisipasi masyarakat digunakan untuk tata kelola pemerintahan. Partisipasi tidak hanya berarti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Menurut Handayani (2021), keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lapangan mampu menekan praktik korupsi dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan transportasi. Hasil penelitian Putra & Anwar (2022) menunjukkan bahwa masyarakat yang dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan kebijakan cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Hal serupa disampaikan oleh Lubis & Sembiring (2023) yang menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan parkir dapat memperkuat rasa memiliki terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah.

Konteks pengelolaan parkir, partisipasi masyarakat juga dapat diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam sistem pengawasan dan pelaporan parkir liar. Menurut Rinaldi & Wibowo (2022), penggunaan teknologi berbasis aplikasi pelaporan publik mampu meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran parkir. Penelitian Yusuf et al. (2024) menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam sistem informasi parkir berbasis digital mempercepat respon pemerintah terhadap keluhan publik. Di sisi lain, Suryani & Malik (2022) menambahkan bahwa peningkatan literasi digital masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan partisipasi publik dalam sistem layanan transportasi modern.

Keberhasilan kebijakan penanganan parkir liar di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu membangun komunikasi publik yang efektif agar kebijakan yang diambil untuk diterima masyarakat. Menurut Hadi & Prasetyo (2023), komunikasi publik yang transparan memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendorong kolaborasi dalam implementasi kebijakan publik. Temuan Ramadhani et al. (2024) juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang aktif berperan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan transportasi di kota besar. Selain itu, Wibisono et al. (2024) menegaskan bahwa model kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat merupakan kunci

keberlanjutan dalam tata kelola transportasi perkotaan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Efektifitas Kebijakan

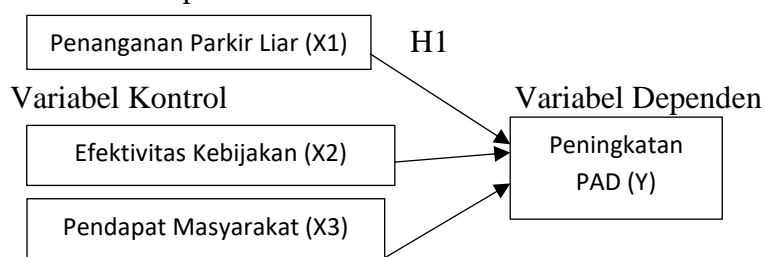
Efektivitas kebijakan menjelaskan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan bukan keberadaannya secara formal, namun dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Sebuah kebijakan dikatakan efektif apabila mampu menjawab permasalahan publik, dilaksanakan secara konsisten berupa sasaran kedepannya. Siregar dan Munandar (2023) menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan publik dapat dilihat dari keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Rahman dan Abdullah (2022) bahwa kebijakan daerah akan berjalan efektif apabila didukung oleh sumber daya yang memadai serta komitmen aparatur dalam menjalankan kebijakan tersebut secara berkelanjutan.

Selain aspek implementasi, efektivitas dipengaruhi oleh kebijakan dan diterima masyarakat. Kebijakan yang tidak transparan atau dianggap tidak adil cenderung menimbulkan penolakan dan rendahnya tingkat kepatuhan. Kartika dan Fadillah (2024) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik, karena keduanya mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini diperkuat oleh Hidayati dan Salim (2023) yang menemukan bahwa keterbukaan informasi dalam pelaksanaan kebijakan daerah berpengaruh positif terhadap persepsi masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan.

Dalam konteks pengelolaan parkir dan transportasi perkotaan, efektivitas kebijakan dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam menertibkan parkir liar, meningkatkan ketertiban lalu lintas, serta mengoptimalkan penerimaan daerah. Kebijakan yang efektif tidak hanya bersifat represif, tetapi juga disertai dengan pengawasan yang konsisten dan evaluasi berkala. Setiawan dan Pratiwi (2023) menyebutkan bahwa efektivitas kebijakan transportasi sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi serta kejelasan regulasi yang diterapkan. Sementara itu, Harahap dan Widodo (2024) menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem evaluasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan transportasi di wilayah perkotaan, termasuk dalam penanganan parkir liar.

Kerangka Konseptual

Variabel independen



Gambar 1. Kerangka Konseptual.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu. Penyusunan hipotesis dilakukan agar penelitian memiliki arah yang jelas serta dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis. Siregar dan Munandar (2023) menyatakan bahwa hipotesis yang baik harus dibangun dari landasan teori yang kuat dan didukung oleh temuan empiris sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, Rahman dan Abdullah (2022) menegaskan bahwa perumusan hipotesis merupakan langkah penting untuk menguji efektivitas kebijakan publik secara objektif dan terukur.

Efektivitas penanganan parkir liar berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penanganan parkir liar yang dilakukan secara konsisten, disertai pengawasan yang memadai, dapat mengurangi kebocoran retribusi dan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor parkir. Penelitian Oktaviani et al. (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan parkir yang efektif berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi PAD di daerah perkotaan. Temuan serupa disampaikan oleh Zahaldi et al. (2024) yang menyatakan bahwa lemahnya penanganan parkir liar dapat menyebabkan hilangnya potensi PAD. Oleh karena itu, efektivitas penanganan parkir liar diduga berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD. Selain penanganan teknis di lapangan, efektivitas kebijakan pemerintah daerah juga diperkirakan memengaruhi keberhasilan peningkatan PAD. Kebijakan yang jelas, konsisten, dan didukung oleh regulasi yang tegas akan mempermudah proses penertiban parkir serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi resmi. Kartika dan Fadillah (2024) menyatakan bahwa efektivitas kebijakan publik berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan daerah melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini diperkuat oleh Sihombing dan Rahayu (2023) yang menemukan bahwa kebijakan daerah yang efektif dan terimplementasi dengan baik mampu meningkatkan PAD secara berkelanjutan, sehingga:

H₁: Efektivitas penanganan parkir liar berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuisioner (kuantitatif). Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan pendapat masyarakat mengenai efektivitas penanganan parkir liar serta menganalisis pengaruhnya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Metode yang digunakan adalah survei dengan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah masyarakat Kota Medan yang menggunakan jasa parkir di area publik seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan kawasan perkantoran. Sampel penelitian berjumlah 71 responden dengan purposive sampling. Teknik ini digunakan dengan pertimbangan bahwa responden merupakan pengguna jasa parkir dan memiliki pengalaman langsung terkait sistem parkir resmi maupun parkir liar di Kota Medan.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data primer berupa hasil kuesioner masyarakat sebanyak 71 orang. Sumber data dari kuisioner online di wilayah Medan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada responden. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Pertanyaan dalam kuesioner mencakup penilaian responden terhadap penertiban parkir liar, pengawasan petugas, sistem pembayaran parkir resmi, serta persepsi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan pengujian statistik untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat digunakan secara akurat dalam menjawab tujuan penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Data hasil kuesioner terlebih dahulu diolah dan dianalisis secara kuantitatif agar hubungan antarvariabel dapat dijelaskan secara objektif dan terukur.

Tahap awal analisis data dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian. Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel, analisis dilanjutkan dengan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini digunakan karena penelitian melibatkan lebih dari satu variabel bebas yang diduga memengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai $Y = a + bX + e$, Y merupakan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), X merupakan variabel independen yaitu efektivitas

penanganan parkir liar, a adalah konstanta, b adalah koefisien regresi, dan e adalah error. Konstanta menunjukkan nilai PAD ketika variabel independen bernilai nol, sedangkan koefisien regresi menggambarkan besarnya perubahan PAD akibat perubahan pada efektivitas penanganan parkir liar. Persamaan regresi linear berganda digunakan untuk melihat arah hubungan serta besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, dilakukan uji t . Tahap akhir dalam analisis data adalah uji koefisien determinasi (R^2). Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai koefisien determinasi menunjukkan proporsi pengaruh variabel independen terhadap peningkatan PAD, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Melalui rangkaian teknik analisis data tersebut, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh efektivitas penanganan parkir liar dan variabel terkait terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi instrumen penelitian. Instrumen dapat dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha $> 0,70$.

Tabel 1. Hasil Uji Reabilitas.

Reliability Statistics			
Item	Cronbach's Alpha	N of Items	Kesimpulan
X1	0,898	4	reliable
X2	0,928	4	reliable
X3	0,929	5	reliable
Y	0,732	4	reliable

Sumber : diolah (2026)

Tabel 1 menjelaskan bahwa seluruh variabel penelitian termasuk dalam kategori reliabel, sehingga instrumen kuesioner memiliki tingkat keandalan yang baik dan konsisten dalam mengukur persepsi responden.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Cons.	3,545	1,486		2,386	0,020
X1	0,311	0,072	0,373	4,312	0,000
X2	0,339	0,113	0,466	2,986	0,004
X3	0,098	0,098	0,156	0,999	0,322

Sumber : diolah (2026)

Tabel 2 menjelaskan analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,545 + 0,311X_1 + 0,339X_2 + 0,098X_3 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 3,545 mengindikasikan bahwa apabila variabel bebas bernilai nol, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap memiliki nilai positif sebesar 3,545. Koefisien regresi variabel Efektivitas Penanganan Parkir Liar (X_1) sebesar 0,311 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan efektivitas penanganan parkir liar akan meningkatkan PAD (Y) sebesar 0,311 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien Efektivitas Kebijakan (X_2) sebesar 0,339 menunjukkan hubungan positif terhadap PAD (Y), sehingga nilai tersebut menunjukkan bahwa tiap perubahan satu satuan Efektivitas Kebijakan, maka pengungkapan PAD naik senilai 0,339 dengan asumsi variabel bebas lainnya dinyatakan konstan. Sedangkan koefisien Pendapat Masyarakat (x_3) sebesar 0,098 menunjukkan arah hubungan positif meskipun relatif kecil, sehingga nilai tersebut menunjukkan bahwa tiap perubahan satu satuan Pendapat Masyarakat, maka pengungkapan PAD naik senilai 0,098 dengan asumsi variabel independen lainnya dinyatakan konstan.

Hasil Uji T untuk pengaruh parsial

Tabel 3. Hasil uji T.

Model	t tabel	t-hitung	Sig	Keterangan
X1	1,994	4,312	< 0,001	Diterima
X2	1,994	2,986	0,004	Diterima
X3	1,994	0,999	0,322	Ditolak

Sumber : diolah (2026)

Tabel 3 menjelaskan Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Kriteria pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel sebesar 1,994 pada tingkat signifikansi 5 persen ($df = n - 1 = 71 - 1 = 70$, $Pr = 5\% = 0,050$) : 1) Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel X_1 memiliki nilai t-hitung sebesar $4,312 > 1,994$ dengan signifikansi $< 0,001 < 0,05$, sehingga X_1 berpengaruh signifikan terhadap PAD. 2) X_2 juga menunjukkan pengaruh signifikan dengan nilai t-hitung sebesar $2,986 > 1,994$ dan signifikansi $0,004 < 0,05$. 3) Variabel X_3 memiliki nilai t-hitung sebesar $0,999 < 1,994$ dengan signifikansi $0,322 > 0,05$, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan PAD Kota Medan dipengaruhi secara signifikan oleh X_1 dan X_2 , sedangkan X_3 tidak memberikan pengaruh langsung secara parsial.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. Hasil uji R.

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,708 ^a	0,502	0,480

Sumber : diolah (2026)

Tabel 4 menjelaskan uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,480. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebesar 48,0% variasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Efektivitas Penanganan Parkir Liar X1, Efektivitas Kebijakan X2, dan Pendapat Masyarakat X3. Sementara itu, sisanya sebesar 52,0% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Efektivitas Penanganan Parkir Liar terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penanganan parkir liar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Hasil menggambarkan bahwa parkir liar yang tidak tertangani dengan baik selama ini menjadi pengurang pendapatan daerah. Saat penertiban dilakukan secara konsisten dan pengawasan diperkuat, pendapatan dari parkir lebih maksimal (Oktaviani et al., 2024; Zahaldi et al., 2024). Secara empiris, Siregar dan Munandar (2023) serta Putra dan Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa pengelolaan parkir yang tertib mampu meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi daerah. Penanganan parkir liar menyebabkan peningkatan PAD, selanjutnya menciptakan sistem perparkiran secara transparan dan akuntabel. Aspek teknis dan pengawasan lapangan memegang peranan penting dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dari sudut pandang kebijakan publik, efektivitas penanganan parkir liar mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat operasional. Kebijakan yang diterapkan secara konsisten akan lebih mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk peningkatan penerimaan daerah. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Pratama et al. (2023) dan Kartika dan Fadillah (2024) yang menekankan pentingnya implementasi kebijakan dalam mendukung kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Efektivitas Kebijakan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan pemerintah daerah secara jelas dan diterapkan secara konsisten mampu mendorong peningkatan PAD. Kebijakan parkir yang efektif memberikan kepastian aturan bagi petugas dan masyarakat sehingga pengelolaan parkir dapat berjalan lebih tertib (Kartika

& Fadillah, 2024; Sihombing & Rahayu, 2023). Hasil penelitian ini sesuai dengan Yuliana dan Hapsari (2022) serta Pratama et al. (2023) yaitu efektivitas kebijakan publik berkontribusi langsung terhadap kinerja daerah. Kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga didukung pengawasan yang berkelanjutan, akan lebih mampu mengurangi potensi penyimpangan dan kebocoran pendapatan. Dalam konteks ini, efektivitas kebijakan parkir menjadi faktor strategis dalam optimalisasi PAD. Selain itu, efektivitas kebijakan juga berkaitan erat dengan kualitas tata kelola sektor publik. Kebijakan yang dijalankan secara konsisten mencerminkan adanya komitmen pemerintah untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan. Temuan ini mendukung penelitian Siregar dan Munandar (2023) serta Akbar et al. (2020) bahwa kebijakan yang efektif sebagai fondasi utama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah berkelanjutan.

Pengaruh Pendapat Masyarakat terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapat masyarakat tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial. Hasil ini menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap pengelolaan parkir tidak berdampak langsung terhadap peningkatan PAD. Peningkatan pendapatan daerah lebih banyak ditentukan oleh kebijakan dan implementasi teknis di lapangan dibandingkan oleh penilaian subjektif masyarakat (Santo & Rahayuningsih, 2022; Lestari et al., 2023). Wibowo et al. (2021) dan Santoso dan Kurniawan (2024) bahwa persepsi masyarakat tidak selalu berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam banyak kasus, pendapat masyarakat lebih berfungsi sebagai umpan balik terhadap kebijakan yang telah diterapkan, bukan sebagai faktor penentu utama peningkatan pendapatan daerah. Oleh karena itu, tidak signifikkannya variabel ini dapat dipahami dalam konteks dominannya peran kebijakan dan pengawasan.

Meskipun tidak berpengaruh secara statistik, pendapat masyarakat tetap memiliki peran penting dalam evaluasi kebijakan publik. Masukan dari masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki implementasi kebijakan agar lebih responsif dan berkelanjutan. Santo dan Rahayuningsih (2022) serta Sihombing dan Rahayu (2023) yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik bukan hanya capaian keuangan, tetapi tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulannya bahwa efektivitas penanganan parkir liar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Penertiban parkir liar yang dilakukan secara konsisten mampu mengurangi kebocoran retribusi dan meningkatkan pencatatan pendapatan daerah secara lebih optimal. Diperkuat oleh Oktaviani et al. (2024) dan Zahaldi et al. (2024) yang menyatakan pengelolaan parkir liar tidak efektif sebagai rendahnya kontribusi sektor parkir terhadap PAD, serta diperkuat oleh Siregar dan Munandar (2023) yang menekankan pentingnya pengawasan lapangan untuk peningkatan pendapatan daerah.

Efektivitas kebijakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan perparkiran yang dirumuskan secara jelas, didukung regulasi yang tegas, serta dilaksanakan secara konsisten mampu mendorong peningkatan PAD. Kebijakan yang efektif memberikan kepastian aturan dan meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan parkir, sehingga berdampak langsung pada kinerja keuangan daerah. Kartika dan Fadillah (2024) dan Pratama et al. (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan publik memiliki peran strategis dalam optimalisasi pendapatan daerah, dan diperkuat oleh Sihombing dan Rahayu (2023) mengenai konsistensi implementasi kebijakan menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan publik.

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, pendapat masyarakat tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD dari sektor parkir lebih banyak ditentukan oleh kebijakan dan implementasi teknis di lapangan dibandingkan oleh persepsi masyarakat semata. Hasil ini sesuai dengan Santo dan Rahayuningsih (2022) dan Lestari et al. (2023) yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan daerah. Namun demikian, Santoso dan Kurniawan (2024) menegaskan bahwa pendapat masyarakat tetap penting sebagai bahan evaluasi kebijakan agar kebijakan yang diterapkan dapat diterima dan dijalankan secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, pemerintah daerah disarankan untuk terus meningkatkan efektivitas penanganan parkir liar melalui penguatan pengawasan di lapangan, penegakan aturan yang konsisten, serta pemanfaatan sistem parkir resmi yang transparan dan terintegrasi. Langkah ini penting untuk meminimalkan kebocoran retribusi dan mengoptimalkan kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan perparkiran yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan. Evaluasi kebijakan secara berkala, peningkatan koordinasi antarinstansi terkait, serta penguatan kapasitas aparatur pengelola parkir menjadi hal penting agar kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dalam meningkatkan PAD.

Saran penelitian selanjutnya yaitu menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, seperti sistem digitalisasi parkir, kualitas pengawasan, atau tingkat kepatuhan petugas parkir. Selain itu, dapat menggunakan metode atau pendekatan yang berbeda supaya lebih komprehensif khususnya optimalisasi PAD dari sektor perparkiran.

DAFTAR REFERENSI

- Alzana, C. P. (2024). Implementasi program parkir elektronik di Jalan Depok, Semarang. *PPMR Undip*, 155-169.
- Fajri, R. (2024). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan parkir di Kota Medan. *Ilmiah Kebijakan Publik*, 45-60.
- Fajri, R., & Siregar, M. (2024). Optimalisasi PAD melalui peningkatan retribusi parkir Kota Medan. *Kebijakan Publik Daerah*, 33-47.
- Hadi, S., & Prasetyo, B. (2023). Reformasi birokrasi dan integritas aparatur dalam pengelolaan transportasi. *Pemerintahan Daerah*, 91-107.
- Halim, R., & Saputra, Y. (2023). Inovasi digital dan efisiensi pengelolaan parkir perkotaan. *Teknologi dan Masyarakat*, 44-58.
- Handayani, W. (2021). Partisipasi publik dalam pengawasan parkir liar di kota metropolitan. *Tata Pemerintahan Daerah*, 70-85.
- Harahap, Y., & Widodo, B. (2024). Evaluasi implementasi kebijakan transportasi terpadu di kota besar. *Kebijakan Pembangunan Daerah*, 50-66.
- Hasibuan, R., & Lubis, F. (2023). Evaluasi efektivitas kebijakan transportasi di kota besar. *Transportasi dan Manajemen Kota*, 40-55.
- Hidayat, A., Nurhadi, S., & Yulianto, R. (2022). Efektivitas implementasi parkir elektronik di kawasan perkotaan. *Transportasi Indonesia*, 77-89.
- Hidayati, N., & Salim, R. (2023). Transparansi dan kepercayaan publik dalam implementasi kebijakan daerah. *Kebijakan Publik dan Akuntabilitas*, 89-104.
- Kartika, P., & Fadillah, A. (2024). Akuntabilitas dan efektivitas kebijakan dalam pengelolaan sektor publik. *Tata Kelola Pemerintahan*, 40-55.

- Lestari, M. (2024). Analisis persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah daerah. *Evaluasi Kebijakan Publik*, 33–47.
- Lubis, A., & Sembiring, F. (2023). Pemberdayaan juru parkir liar sebagai upaya penataan kota. *Pemberdayaan Masyarakat*, 55–69.
- Ningsih, R., & Mahendra, A. (2021). Koordinasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan parkir kota. *Administrasi Publik Modern*, 55–70.
- Oktaviani, L., Sutanto, H., & Hidayat, A. A. (2024). Analisis perbandingan efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir serta kontribusinya terhadap PAD. *Jurnal Ekuilnomi*, 15–30.
- Pertiwi, S. (2023). Dampak sistem e-parking terhadap kepuasan masyarakat dan penurunan parkir liar. *Jurnal Ekonomi Publik*, 88–100.
- Pratiwi, D., Rahman, L., & Siregar, J. (2023). Pengaruh transparansi penggunaan dana retribusi terhadap kepatuhan masyarakat. *Jurnal Kebijakan Fiskal Daerah*, 15–29.
- Putra, M., & Anwar, D. (2022). Dampak sosial ekonomi penertiban parkir liar di daerah perkotaan. *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*, 101–115.
- Rahayu, E., & Yusuf, H. (2022). Ketersediaan lahan parkir dan dampaknya terhadap meningkatnya parkir liar di wilayah perkotaan. *Jurnal Transportasi dan Tata Kota*, 70–85.
- Rahman, L., & Abdullah, R. (2022). Faktor penentu efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 33–49.
- Rahmawati, F., & Fadillah, A. (2023). Evaluasi penerapan e-parking dalam pengelolaan parkir perkotaan. *Jurnal Manajemen Transportasi*, 78–92.
- Ramadhani, F., Siregar, R., & Wahyudi, D. (2024). Efektivitas kebijakan publik dalam sektor transportasi kota besar. *Jurnal Kebijakan Daerah*, 45–60.
- Rinaldi, A., & Wibowo, H. (2022). Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen transportasi daerah. *Jurnal Sistem Informasi Publik*, 90–102.
- Santoso, H., & Kurniawan, A. (2024). Persepsi masyarakat terhadap kebijakan retribusi parkir di wilayah perkotaan. *Jurnal Ilmu Sosial Terapan*, 55–70.
- Sari, R., & Rahmawati, N. (2023). Digitalisasi sistem parkir dan dampaknya terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 45–59.
- Setiawan, I., & Pratiwi, D. (2023). Efektivitas kebijakan transportasi dalam menurunkan kemacetan perkotaan. *Jurnal Transportasi dan Manajemen Kota*, 77–92.
- Sihombing, A., & Rahayu, T. (2023). Efektivitas kebijakan pemerintah dalam peningkatan PAD daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pemerintahan Daerah*, 78–92.

- Siregar, A., & Munandar, T. (2023). Efektivitas kebijakan publik dalam peningkatan pelayanan publik daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 44–58.
- Suhendra, R., & Wahyuni, E. (2022). Peran partisipasi masyarakat dalam efektivitas implementasi kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan*, 90–105.
- Suryani, E., & Malik, F. (2022). Sinergi pemerintah dan swasta dalam digitalisasi layanan publik. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara*, 88–103.
- Suryani, E., & Prasetyo, B. (2023). Desentralisasi fiskal dan kemandirian PAD di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 65–80.
- Syamsudin, A., Zulkarnain, H., & Putri, D. (2021). Koordinasi antarinstansi dalam implementasi kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 70–85.
- Wibisono, D., Rahmat, H., & Nasution, R. (2024). Kemitraan publik-swasta dalam pengelolaan parkir Kota Surabaya. *Jurnal Manajemen Transportasi Indonesia*, 66–80.
- Wicaksono, D., & Lestari, M. (2021). Adaptabilitas pemerintah terhadap perubahan sosial dan teknologi dalam pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Sosial dan Inovasi Kebijakan*, 22–38.
- Wulandari, T. (2021). Pendekatan partisipatif dalam penertiban parkir liar. *Jurnal Kebijakan Publik dan Sosial*, 120–135.
- Yusuf, R., Wahyuni, S., & Lestari, A. (2024). Efektivitas penerapan parkir elektronik terhadap peningkatan PAD. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 45–60.
- Zahaldi, R. F., Fionasari, D., & Suriyanti, L. H. (2024). Analisis pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir pada PAD Kota Pekanbaru. *Jurnal IAKP*, 192–205.